

INFRASTRUKTUR

Jalan Trans-Jawa Terhambat Lahan

MADIUN, KOMPAS — Pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 1.000 kilometer dari Anyer hingga Banyuwangi terkendala pembebasan lahan. Akibatnya, jalan yang dicanangkan pada tahun 2004 itu saat ini baru terealisasi 58,3 persen atau sepanjang 653,86 kilometer.

Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sosial dan Budaya Pandu Waskito, di Madiun, Kamis (5/9). Pihaknya telah merangkul pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama mengatasi dan mempercepat masalah pembebasan lahan supaya pembangunan segera bisa direalisasikan.

"Target kami, sebelum akhir tahun 2014, lahan yang dibebaskan sudah mencapai 100 persen. Apabila tidak, kami harus memulainya dari awal lagi atau dari nol karena mulai 1 Januari 2015 undang-undang pengadaan tanah yang baru mulai berlaku," ujarnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, panitia harus mengulang proses sosialisasi kepada masyarakat dari awal. Apalagi, peraturan-

an baru ini berbeda dengan sebelumnya, yakni PP Nomor 36 Tahun 2006 dan PP Nomor 65 Tahun 2007.

"Seperti di luar negeri, ada kepastian waktu penyelesaian pembebasan tanah, yakni 523 hari kerja. Selain itu, apabila semua proses terpenuhi, tetapi masyarakat tidak sepakat mengenai penawaran, mereka bisa kehilangan hak atau mengajukan ke pengadilan," katanya.

Di pengujung tahun 2013, Kementerian PU berharap bisa menuntaskan pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan di Jawa Timur dan jalan tol Ungaran-Bawen di Semarang, Jawa Tengah. Untuk pembangunan tol Kertosono-Solo sepanjang 183 kilometer realisasinya agak terlambat.

Penyebabnya, belum tuntasnya pembebasan lahan di segmen Caruban, Kabupaten Madiun, hingga Mantingan, Kabupaten Ngawi. Realisasi pembebasan lahan hingga Agustus 2013 baru mencapai 67 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Soekardi mengatakan, baru 14,95 persen lahan yang dibebaskan sejak tahun 2012. Sebelum itu, pembebasan tidak ja-

lan. Targetnya, hingga akhir 2013 total lahan yang bebas mencapai 50 persen.

"Saat ini kendalanya hanya belum dibayarkannya honor satgas selama tahun 2012 sehingga mereka enggan bekerja. Karena itu, kami mendesak pemerintah pusat segera mencairkan honor 138 satgas di Madiun," katanya.

Di Kabupaten Magetan, kendalanya beda lagi. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mei Sugianti mengatakan, pembebasan lahan sudah mencapai 78,81 persen. Tinggal 21,19 persen sisanya yang berupa tanah kas desa.

"Persoalannya, para kepala desa di wilayah kami belum definitif sehingga sesuai aturan, mereka tidak bisa menandatangani pengalihan aset. Kami harus menunggu pemilihan kepala desa dan itu butuh penahanan. Rencana pemilihan serentak Oktober 2013 ini," ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ngawi belum bisa dikonfirmasi terkait masalah pembebasan lahan jalan tol ruas Mantingan. Sebab, dalam sejumlah pertemuan, perwakilan dari pemerintah daerah tidak hadir.

(NIK)